

BAB II

***WOMEN'S LEAGUE OF BURMA* DAN PERJUANGAN DEMOKRASI DI MYANMAR**

Dalam bab dua penulis akan menjelaskan terkait sejarah *Women's League of Burma (WLB)* dan dinamika demokrasi di Myanmar. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1948, negara ini mengalami berbagai konflik etnis dan militer yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan. Dalam konteks ini, akan dibahas terkait *Women's League of Burma (WLB)* yang muncul sebagai suara kolektif untuk mendorong perubahan. Berbagai fase dalam perjalanan demokrasi, termasuk pemerintahan militer yang ketat dan transisi menuju pemerintahan sipil yang lebih demokratis telah dilewati oleh *Women's League of Burma (WLB)* hingga akibat dari terjadinya kudeta pada tahun 2021 yang terjadi bersamaan dengan pandemi *Covid-19* sehingga membuat dinamika demokrasi di Myanmar semakin kompleks.

2.1 Sejarah Women's League of Burma

Berdiri pada 9 Desember 1999 sebagai organisasi payung untuk perempuan dari berbagai etnis di Myanmar.¹ *Women's League of Burma (WLB)* memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, meningkatkan perempuan dalam partisipasi politik, dan mendukung perdamaian serta rekonsiliasi konflik di

³⁹ Burma, W. o. (2024). *Programs | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.womenofburma.org/programs>

Myanmar. Organisasi ini telah didirikan pada forum kedua *Women's League of Burma (WLB)* yang diadakan di Chiang Mai, Thailand dari tanggal 7 hingga 9 Desember 1999.² Forum ini mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya untuk membahas cara meningkatkan situasi perempuan di Burma dan mempromosikan partisipasi mereka dalam bidang politik. Berbagai peran penting tengah diperjuangkan Myanmar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendukung proses perdamaian di Myanmar.

Women's League of Burma (WLB) lahir dalam upaya untuk menegakkan tujuan dan sasaran dari perjanjian Panglong yang merupakan perjanjian pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengakui hak otonomi bagi kelompok-kelompok etnik di wilayah-wilayah Myanmar. Perempuan yang hadir dan menginisiasi berdirinya *Women's League of Burma (WLB)* telah berfokus untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan berbagi pandangan terkait cara meningkatkan situasi yang tengah dihadapi perempuan-perempuan Myanmar.³ Termasuk membahas cara bekerjasama untuk mengubah adanya stereotip gender yang sudah mengakar dan tradisional, mendorong partisipasi perempuan dalam ranah politik serta menyuarakan suara perempuan Burma yang telah lama dibungkam oleh rezim militer Myanmar.

Selama forum tersebut berlangsung, kelompok-kelompok perempuan berpartisipasi dengan suara bulat untuk membentuk organisasi induk yang terdiri atas organisasi-organisasi perempuan Burma yang sudah ada sebelumnya dengan

⁴⁰ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

⁴¹ *Ibid*

latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda. Dengan demikian berdirilah *Women's League of Burma (WLB)* dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional serta meningkatkan peran perempuan Burma dalam tingkat nasional hingga internasional.⁴ Terdapat 12 organisasi anggota dari berbagai kelompok etnis dan latar belakang berbeda telah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan berada di bawah naungannya.

Selama perjalanannya, *Women's League of Burma (WLB)* telah terlibat dalam dialog antar etnis dan mendukung inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan. Dalam konteks pemerintahan dan politik di Myanmar, *Women's League of Burma (WLB)* tengah berusaha untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik melalui mendorong perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan dalam berbagai kampanye dan programnya.

Sebelum pandemi *Covid-19*, *Women's League of Burma (WLB)* tengah menghadapi berbagai tantangan meliputi kekerasan dan diskriminasi pada perempuan di Myanmar yang seringkali tengah menjadi korban kekerasan, baik di dalam rumah tangga hingga pada masyarakat. *Women's League of Burma (WLB)* bekerja keras untuk mengatasi permasalahan meluasnya kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah etnis melalui advokasi dan pendidikan bagi perempuan.

⁴² Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

Adanya norma patriarki dan stereotip gender tradisional telah membatasi perempuan dalam proses partisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, *Women's League of Burma (WLB)* hadir untuk mempromosikan kesetaraan gender sesuai dengan visi dan misinya yang merupakan tercapainya demokrasi federal Burma didasarkan pada perdamaian sejati, keadilan sosial dan politik serta kesetaraan gender serta etnis yang mana diselaraskan dengan memajukan status perempuan menuju persatuan demokrasi federal burma yang damai, adil dan berdaulat.⁵ Dengan tujuan yang dimiliki untuk pemberdayaan dan peningkatan status perempuan, mengusahakan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, mengusahakan penghapusan pada segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan. Hal lainnya agar perempuan turut berpartisipasi secara efektif dalam menggerakkan perdamaian, demokrasi dan rekonsiliasi nasional.

Adapun sejak berdirinya *Women's League of Burma (WLB)* tengah memiliki beberapa program dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Program perdamaian dan rekonsiliasi yang berfokus pada pemberantasan konflik di Burma dengan melibatkan perempuan dalam negosiasi dan proses perdamaian. Program ini mencakup *peace exchange* yang dilakukan setiap tahun, *workshops*, *grassroots training events*, dan kegiatan tahunan untuk *International Peace Day*. Program pemberdayaan politik yang didalamnya memiliki tujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pengembangan kapasitas dan

⁴³ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

advokasi. Program perempuan melawan kekerasan dengan tujuan untuk melawan kekerasan untuk memberantas konflik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik serta melindungi perempuan dari banyaknya kekerasan yang terjadi.

Program-program tersebut telah menjadi landasan *Women's League of Burma (WLB)* dalam upaya memberantas konflik dan memperjuangkan demokrasi dengan fokus pada keterlibatan perempuan melalui proses negosiasi untuk perdamaian. Program ini telah berkembang pada 51 program *peace exchange* tahunan dimana perempuan dan laki-laki berkumpul guna membahas strategi konflik dan pembangunan perdamaian di komunitas mereka. Melakukan kegiatan pada *International Peace Day* pada 26 lokasi berbeda hingga adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan perdamaian.⁶ Sebuah laporan dengan judul *Burma: The Current State of Women in Conflict Area* yang dipublikasikan melalui *website* resminya telah menjadi salah satu upaya yang dilakukan.

Women's League of Burma (WLB) memiliki organisasi keanggotaan yang terdiri atas berbagai kelompok perempuan etnis minoritas dari Burma yang telah terlibat dalam kegiatan penyusunan konstitusi gerakan pro-demokrasi juga sejalan dengan *Federal Constitution Drafting Coordinating Committee (FCDCC)* yang didukung oleh Pusat Demokrasi Konstitusional dalam Masyarakat Plural di Indiana University Maurer School of Law.⁷ Berlokasi di Yangon, Myanmar (Burma) organisasi atau kelompok kepentingan ini tengah mendapatkan dukungan finansial

⁴⁴ Burma, W. o. (2024). *Programs | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.womenofburma.org/programs>

⁴⁵ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/members>

oleh berbagai sumber termasuk hibah dari organisasi internasional dan sumbangan dari para pendukung. Disamping itu, *Women's League of Burma (WLB)* tengah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk mendukung operasional program-programnya yang memiliki tujuan untuk mempromosikan hak-hak dan pemberdayaan perempuan di Burma.

Adapun nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh *Women's League of Burma (WLB)* telah dipilih dari berbagai alternatif dipilih dan telah dilakukan refleksi yang matang, dihargai dan disayangi serta ditegaskan secara publik, ditindaklanjuti dan merupakan bagian dari pola yang merupakan tindakan berulang. Terdapat sembilan nilai-nilai penuh untuk mengatur pekerjaannya yang mana merupakan perdamaian, *justice, equality, rights, respect, diversity, unity & solidarity, responsibility & accountability, transparency* yang dijabarkan dibawah ini.⁸

Perdamaian yang dipahami merupakan perdamaian lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan, tetapi juga adanya keadilan sosial melalui kesempatan yang sama, distribusi kekuasaan dan sumber daya, serta perlindungan yang sama. Kami akan berkontribusi pada perdamaian dengan bekerja menuju kesetaraan gender dan etnis serta keadilan sosial dan politik. Kami akan berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan dalam semua tindakan kami. Kami akan berusaha melindungi warga negara dari serangan. Kami akan mempromosikan dan mengadvokasi federalisme demokratis sebagai dasar dan cara untuk mempertahankan perdamaian di Burma.

⁴⁶ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

Masuk dalam selanjutnya merupakan keadilan yang mana dipahami dengan ketertarikan keadilan transisi untuk memperbaiki warisan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam menjauh dari konflik menuju masa depan yang lebih damai, pasti, dan Demokratis. Poin berikutnya kesetaraan dimana *Women's League of Burma (WLB)* mempercayai bahwa setiap perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan hidup dan bakat mereka dan bahwa tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kesempatan hidupnya karena tempat atau siapa dia dilahirkan atau apa yang dia yakini. Hal tersebut diyakini dan beraksi melalui komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi dalam kata-kata ataupun tindakan, *Women's League of Burma (WLB)* juga berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip demokrasi sehingga semua perempuan memiliki hak bicara yang sama dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan *Women's League of Burma (WLB)*.⁹

Nilai Kebenaran yang diyakini merupakan semua orang harus memiliki akses terhadap serangkaian kebebasan dan hak universal yang ditentukan dalam konvensi PBB yang mana merupakan rumah nasional yang secara khusus membahas tentang bagaimana perempuan dapat melindungi dan melaksanakan hak-hak mereka. *Women's League of Burma (WLB)* memahami bahwa hak asasi manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap individu. Dengan cara menghormati semua orang, *Women's League of Burma (WLB)* juga memiliki

⁴⁷ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

komitmen untuk memberdayakan dan mendukung perempuan dalam mengklaim dan melaksanakan hak-hak mereka.¹⁰

Penghargaan dan penghormatan sebagai nilai yang diyakini *Women's League of Burma (WLB)* dengan memahami bahwa menghormati orang lain merupakan dasar dari HAM. Hal ini berkaitan dengan memperhatikan keyakinan orang lain, *Women's League of Burma (WLB)* tertarik pada rasa saling menghormati dimana pengakuan yang diberikan terhadap orang lain setara dengan pengakuan mereka terhadap masing-masing individu. Dengan cara mengakui dan menghargai diri sendiri dan orang lain, *Women's League of Burma (WLB)* juga akan mendorong orang lain untuk mengakui dan menghargai serta mendorong anggota untuk mengekspresikan keyakinan mereka dalam kata-kata dan tindakan.¹¹

Keragaman yang ada di Burma juga dipercayai oleh *Women's League of Burma (WLB)* bahwa masing-masing dari masyarakat burma memiliki kontribusi penting untuk memajukan status perempuan di Burma, terlepas dari perbedaan gender, etnis, status sosial, disabilitas, dan perbedaan lainnya. Karena adanya keyakinan ini, *Women's League of Burma (WLB)* berusaha merayakan perbedaan yang ada dan menunjukkan penerimaan penuh terhadap perbedaan tersebut dengan mengakui bahwa perbedaan yang ada ini telah membuat semuanya jauh lebih kuat. Komitmen lainnya yang dipertahankan yakni mengikuti prinsip federalisme yang mana memahami bahwa kekuasaan untuk mengatur *Women's League of Burma*

⁴⁸ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

⁴⁹ *Ibid*

(WLB) berada di tangan semua anggota secara setara, serta secara aktif mengejar federalisme di Burma untuk menghormati keragaman etnis di Burma.¹²

Kebersamaan dan solidaritas menjadi sebuah ikatan yang mengikat *Women's League of Burma (WLB)* bersama yang telah dianggap hal utama yang sangat penting. Pemahaman yang diyakini merupakan pembicaraan dan tindakan dianggap sebagai satu kesatuan hanya jika telah dimiliki nilai dan kepentingan yang sama. Semua akan berusaha mencapai konsensus untuk semua keputusan sebagaimana seharusnya dan di mana pun memungkinkan. *Women's League of Burma (WLB)* akan mengikuti prinsip-prinsip federalisme dengan memahami bahwa kekuasaan untuk mengatur liga wanita berada di tangan semua organisasi anggota secara setara. Disamping itu juga akan secara aktif mengejar federalisme di Burma untuk menghormati persatuan nasional.¹³

Akuntabilitas dan tanggungjawab telah dipahami untuk tugas dan kemampuan untuk mendapatkan informasi, menanggapi, dan mengambil tindakan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian *Women's League of Burma (WLB)*. Hal lainnya juga menyadari bahwa mendapatkan informasi dan terlibat adalah prinsip utama demokrasi. *Women's League of Burma (WLB)* mempercayai bahwa harus terlebih dahulu berfokus kepada perempuan dan komunitas yang dilayani. Kesadaran lainnya adalah pentingnya memberikan pemahaman kepada para donatur bahwa apakah mereka memiliki pemangku kepentingan satu sama lain. Karena adanya keyakinan ini, *Women's League of Burma (WLB)* akan menerima

⁵⁰ Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

⁵¹ *Ibid*

tanggung jawab atas tindakan individu dan kolektif serta akan menginformasikan dan orang lain tentang isu-isu yang telah menjadi perhatian. *Women's League of Burma (WLB)* juga akan mengikuti prinsip demokrasi dalam membuat keputusan dan menjawab satu sama lain dimana menjelaskan semua kegiatan yang dijalankan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang relevan, perjanjian dan praktik yang baik.¹⁴

Hal terakhir yang menjadi nilai-nilai dari *Women's League of Burma (WLB)* merupakan transparansi yang dipercayai bahwa keterbukaan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan. *Women's League of Burma (WLB)* mengatakan akan terbuka tentang semua yang dikatakan dan dilakukan. Termasuk akan berbagi informasi dengan murah hati, mempromosikan dan menyediakan akses ke informasi serta melaporkan dengan tepat kepada mitra dan pemangku kepentingan *Women's League of Burma (WLB)* sendiri. Berbagai nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar dan pola untuk menggerakkan kelompok ini termasuk dalam sejarah panjang perkembangan *Women's League of Burma (WLB)* sejak berdirinya hingga saat ini.¹⁵ Nilai-nilai tersebut telah menjadi landasan dalam perjuangannya untuk meningkatkan menggerakkan perempuan-perempuan Burma dalam memperjuangkan demokrasi Myanmar.

⁵² Burma, W. L. o. (2024). *Background | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.womenofburma.org/background>

⁵³ *Ibid*

2.1.1 Women's League of Burma pada Masa Pandemi Covid-19

Permasalahan *Women's League of Burma (WLB)* ketika Pandemi *Covid-19* tengah menjadi signifikan. Kekerasan seksual sistematis yang kerap terjadi bersamaan dengan adanya pandemi memberikan dampak lebih jauh terhadap perempuan dan hal ini berlanjut pada perang saudara dan terjadinya konflik etnis di seluruh negeri. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh rezim militer termasuk pemindahan paksa, pemerasan dan penyitaan tanah properti sehingga menyebabkan banyak warga negara Burma melarikan diri ke negara tetangga untuk menghindari pelanggaran ini. Termasuk pemerintah telah membatasi kebebasan dan ruang gerak sipil untuk bergerak, berkumpul dan berekspresi baik secara luring dan juga daring. Pembatasan ini lebih mencolok terjadi pada aktivis dan jurnalis yang tengah melakukan kritik terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah.

Perjuangan politik dan aksi kemanusiaan yang dilakukan ketika pandemi juga tengah menjadi arena politik yang kritis di Myanmar. Termasuk respon rezim militer terhadap *Covid-19* di Myanmar telah dipolitisasi dan aksi tindakan kemanusiaan seperti pemberian bantuan medis tidak dipertimbangkan secara cermat hingga berakhir tidak adanya pemerataan dan mengakibatkan melemahnya aktivitas anti kudeta.¹⁶ Adapun dari semua hal yang terjadi dampak terhadap perempuan dan anak nampak sangat nyata ketika keduanya diproyeksikan akan menanggung beban terberat dari dampak sosial dan juga pandemi. Dari perempuan dan juga anak-anak telah menghadapi peningkatan kerentanan terhadap kemiskinan

⁵⁴ Carter, L. (2021, Mei 09). *Myanmar: Konflik Bersenjata Menghambat Respon Covid-19*. <https://www.dw.com/id/myanmar-konflik-bersenjata-halangi-upaya-mengatasi-sebaran-virus-covid-19/a-53373340>

dan ketidakstabilan sosial yang akan memperburuk ketidaksetaraan gender yang ada.

Dalam masa ini *Women's League of Burma (WLB)* terus melakukan kegiatan advokasi dan mobilisasi dalam bentuk pelatihan daring dan kampanye kesadaran kesehatan; melakukan bantuan kemanusiaan melalui partisipasinya dalam distribusi bantuan dan program dukungan psikologis; melakukan penyebaran informasi melalui media sosial dan memanfaatkan sumber daya digital. Sejalan dengan poin nilai-nilai yang bertujuan agar memaksimalkan peran perempuan dalam proses demokrasi di Myanmar.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye oleh *Women's League of Burma (WLB)* telah dilakukan atas dasar adanya pemerintahan yang memberikan batasan terhadap ruang gerak masyarakat, termasuk mengekspresikan diri melalui media sosial. Telah diselenggarakan lebih dari 20 sesi pelatihan *online* untuk perempuan di seluruh Myanmar dengan fokus pada kepemimpinan, hak asasi manusia, dan strategi advokasi. Mereka meluncurkan kampanye untuk kesadaran kesehatan di media sosial yang menjangkau ribuan orang, dengan fokus pada pentingnya pencegahan *Covid-19*, kesehatan mental, dan akses ke pelayanan kesehatan.¹⁷

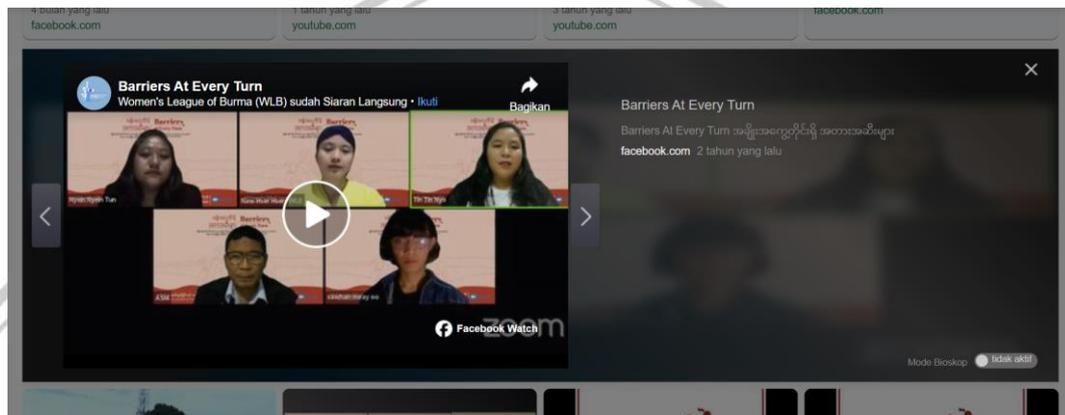
Adapun dalam meningkatkan jaringan dan kolaborasi *Women's League of Burma (WLB)* melakukan kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk memperluas jangkauan program dan advokasi mereka.¹⁸ Mereka juga aktif

⁵⁵ Burma, W. o. (2024). *Programs | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.womenofburma.org/programs>

⁵⁶ *Ibid*

dalam forum internasional untuk menggalang dukungan global dan menyuarakan isu-isu perempuan dalam konteks krisis di Myanmar.

Gambar 2 1 Online Event Barriers At Every Turn oleh Women's League of Burma (WLB)



sumber : facebook *Women's League of Burma (WLB)*

Kampanye melalui *event* dengan nama *Barriers at Every Turn* menjadi salah satu upaya yang dilakukan *Women's League of Burma (WLB)* terkait pemberdayaan perempuan yang dipublikasikan melalui media sosial. Beberapa program yang lain juga disebarluaskan melalui sosial media youtube telah menjangkau lebih dari 1000 tayangan dengan ratusan interaksi dari pengguna yang mendukung gerakan mereka. Mereka menyediakan berbagai sumber daya digital, termasuk panduan dan materi pendidikan, yang diakses oleh banyak perempuan di seluruh Myanmar.¹⁹

⁵⁷ Burma, W. o. (2024). *Programs | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.womenofburma.org/programs>

Selama pandemi *Covid-19* terdapat korelasi antara demokrasi, *Women's League of Burma (WLB)*, dan kekerasan terhadap perempuan di Myanmar pada masa *Covid-19* dikarenakan adanya ketidakstabilan politik yang meningkatkan resiko kekerasan terhadap perempuan yang mana didalamnya. WLB terus berjuang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi dan perdamaian di Myanmar. Organisasi ini berusaha untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan mengadvokasi keadilan gender dalam konteks konflik dan krisis.

Pada masa pandemi, kekerasan terhadap perempuan di Myanmar telah meningkat, kondisi *lockdown dan curfews* yang ketat membuat lingkungan rumah tangga menjadi tempat yang rawan untuk kejadian kekerasan domestik dan kekerasan berbasis gender. Meskipun tidak ada angka spesifik yang disebutkan dalam sumber-sumber yang diberikan, artikel-artikel tersebut menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan selama pandemi. Kekerasan terhadap perempuan selama pandemi *Covid-19* di Myanmar yang meliputi kekerasan domestik, kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik dan psikologis hingga kekerasan dalam bentuk penindasan dan diskriminasi yang terjadi tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga tenaga kesehatan.

Sistem kesehatan yang sudah lemah mengalami beban tambahan dengan banyak rumah sakit kekurangan tempat tidur dan peralatan medis sehingga kesulitan dalam menangani kasus *Covid-19*.²⁰ Akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi masalah khususnya pada wilayah terpencil. Namun, tengah dilakukan

⁵⁸ Ebbighausen, R. (2021, February 8). *Myanmar coup protests inflamed by poverty and coronavirus* – DW – 02/08/2021. DW. Retrieved October 28, 2024, from <https://www.dw.com/en/myanmar-coup-protests-inflamed-by-poverty-and-coronavirus/a-56500168>

survey tidak merata dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dengan hasil pandemi telah menyebabkan stres psikologis yang signifikan dimana sekitar beberapa responden mengalami stres dengan perempuan lebih banyak terpengaruh dibandingkan laki-laki. Kurangnya dukungan untuk menghadapi stres ini dapat memperburuk kondisi mental masyarakat. Organisasi bantuan seperti *Medecins Sans Frontieres (MSF)* telah berusaha membantu masyarakat yang terdampak dengan membuka pusat perawatan Covid-19 dan memberikan dukungan medis.²¹ Namun keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan utama mengingat banyak fasilitas kesehatan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat selama pandemi.

2.2 Demokrasi di Myanmar Sebelum Pandemi Covid-19

Myanmar telah diperintah oleh junta militer selama bertahun-tahun sejak memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1948. Persatuan Burma dimulai sebagai demokrasi parlementer seperti halnya negara Inggris yang menjadi pelopor sistem parlementer tersebut. Namun, demokrasi perwakilan hanya bertahan hingga tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win yang merupakan seorang politisi dan komandan militer melakukan kudeta militer dan memegang kekuasaan selama dua puluh enam tahun berikutnya.

Jenderal Ne Win melembagakan konstitusi baru pada tahun 1974 berdasarkan kebijakan luar negeri isolasionis dan program ekonomi sosialis yang

⁵⁹ MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar Burma. Kebijakan tersebut membuat situasi ekonomi memburuk dengan cepat dan ekonomi pasar gelap mulai berlaku. Pada tahun 1988, korupsi telah meluas, perubahan cepat dalam kebijakan ekonomi yang terkait dengan mata uang Myanmar dan kekurangan pangan menyebabkan protes besar-besaran. Pada pertengahan tahun 1988 tentara menindak tegas para pengunjuk rasa, menewaskan sedikitnya tiga ribu orang dan menggusur ribuan lainnya.²²

Setelah kudeta yang terjadi pada tahun 1988, Jenderal Ne Win mengundurkan diri sebagai ketua partainya. Meskipun tetap aktif di balik layar saat junta militer lain mengambil alih kekuasaan, pada tahun 1989 rezim militer yang baru mengubah nama negara dari Persatuan Burma menjadi Persatuan Myanmar dengan Rangoon sebagai ibukota-nya berganti nama menjadi Yangon.

Pada tahun 2005 pemerintah militer memindahkan ibu kota administratif ke Nay Pyi Taw, sebuah kota yang dibangunnya di Myanmar bagian tengah. Junta militer berpendapat bahwa nama "Burma" merupakan sisa-sisa era kolonial yang menguntungkan mayoritas etnis Burma dan penamaan "Myanmar" dianggap lebih inklusif. Berujung pada tahun 2007 Revolusi Saffron atau protes anti pemerintah yang meluas yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar dan dinamai berdasarkan jubah berwarna saffron yang dikenakan oleh para biksu Buddha yang berpartisipasi membludak. Menghadapi tekanan internasional, junta militer mulai melonggarkan kendali karena memiliki keyakinan akan dapat terus memerintah Myanmar

⁶⁰ MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

meskipun mundur sedikit. Terdapat kemungkinan juga ingin menarik investasi dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Pada tahun 2008, junta militer mengajukan konstitusi baru yang masih berlaku hingga saat ini yang mana memberikan kekuasaan luas kepada militer bahkan di bawah pemerintahan sipil. Junta militer secara resmi bubar pada tahun 2011 dan membentuk parlemen sipil yang didominasi militer untuk masa transisi dimana anggota lama birokrat militer dan Perdana Menteri Thein Sein diangkat menjadi presiden.²³

Presiden Thein Sein memelopori beberapa reformasi termasuk memberikan amnesti kepada tahanan politik, melonggarkan sensor media, dan menerapkan kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi asing. Pada tahun 2015, Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum multipartai nasional pertamanya. Partai oposisi *National League of Democracy (NLD)* yang dipimpin Suu Kyi meraih kemenangan telak. Anggota parlemen baru memilih Htin Kyaw seorang yang merupakan kepercayaan lama Suu Kyi sebagai presiden. Namun, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan Aung San Suu Kyi yang diangkat ke posisi penasihat negara yang baru dibentuk dan menjadi kepala pemerintahan sipil secara *de facto*. Akan tetapi, Tatmadaw masih memegang kendali atas keamanan dalam negeri yang sebagian besar aspek hubungan luar negeri dan banyak hal lain yang terkait dengan kebijakan dalam negeri yang berhubungan dengan konstitusi tahun 2008 memuat

⁶¹ MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

beberapa ketentuan untuk melindungi dominasi militer seperti menyediakan kursi parlemen untuk militer.

Myanmar telah mengalami demokrasi yang kompleks dan rapuh dikarenakan transisi demokrasi. Awal reformasi terjadi dan dimulai pada saat pemilihan umum yang dilangsungkan pada tahun 2010 yang secara luas telah dipandang sebagai pembukaan yang dikendalikan oleh militer. *The Union Solidarity Development Party (USDP)* yang didukung oleh militer telah memenangkan suara mayoritas dan menjadi sebuah panggung reformasi bertahap.²⁴

Ditengah perjalanan pemerintahan tersebut pada tahun 2008 konstitusi telah menjamin kontrol militer atas kementerian-kementerian utama dan menyediakan sebesar 25% untuk kursi parlemen dari perwakilan militer. Pengaturan ini memungkinkan militer untuk mempertahankan pengaruh signifikansi atas urusan pemerintahan meskipun terjadi transisi ke pemerintahan sipil. Militer tengah berusaha untuk memberikan pengaruhnya dengan berbagai cara, termasuk melakukan kontrol atas pasukan keamanan dan pengelolaan dalam narasi pada media.

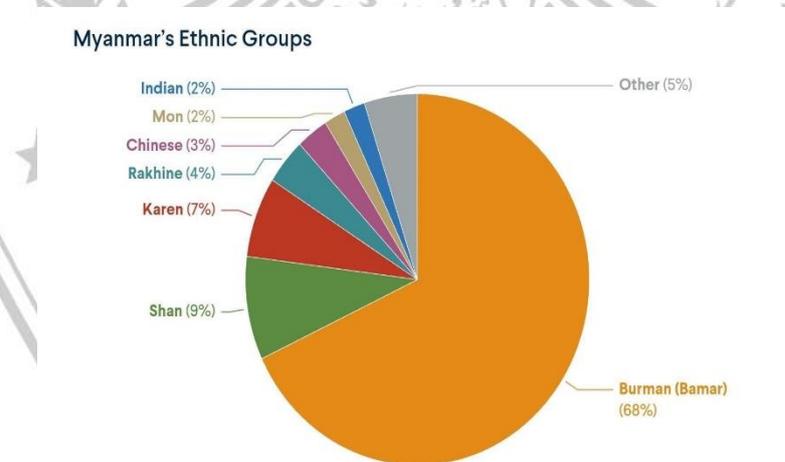
Perjalanan hingga pada tahun 2015 adalah proses pembebasan tahanan politik terkemuka, termasuk Aung San Suu Kyi yang telah dibebaskan dan *National League of Democracy (NLD)* diizinkan untuk berpartisipasi kembali dalam politik. Pada pemilihan umum tahun 2015 *National League of Democracy (NLD)* menang telak dan menandai langkah signifikan menuju pemerintahan yang demokratis.

⁶² MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

Aung San Suu Kyi menjadi Penasihat Negara meskipun ketentuan konstitusional memastikan bahwa militer mempertahankan kekuasaan yang substansial. Terdapat kesamaan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana kontrol militer terhadap keamanan dan pengelolaan media masih diberlakukan dan menjadi masalah krusial yang tengah dihadapi masyarakat.

Disamping terjadinya pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer, Myanmar merupakan negara yang beragam dengan negara yang mengakui lebih dari seratus kelompok etnis. Membentuk sekitar dua pertiga dari populasi, etnis Burma, yang dikenal sebagai Bamar telah menikmati posisi istimewa dalam masyarakat dan telah memegang mayoritas posisi pemerintahan dan militer. Di sisi lain, banyak kelompok etnis minoritas telah menghadapi diskriminasi sistemik kurangnya peluang ekonomi dan pembangunan di wilayah mereka, representasi minimal dalam pemerintahan dan pelanggaran di tangan militer.

Grafik 2 1 Grafik Populasi Kelompok Etnis di Myanmar



sumber : *CIA World Factbook*

Perpecahan etnis yang sengaja dibuat di bawah pemerintahan kolonial Inggris dan diskriminasi yang berkelanjutan telah memicu konflik bersenjata yang panjang antara Tatmadaw dan lebih dari selusin organisasi etnis bersenjata, serta puluhan kelompok milisi yang lebih kecil, yang menghasilkan apa yang oleh beberapa analis digambarkan sebagai perang saudara terpanjang di dunia. Setelah kemerdekaan negara itu, beberapa organisasi etnis bersenjata berjuang untuk otonomi yang lebih besar. Ketegangan diperburuk pada tahun 1962, ketika junta militer mengambil alih, membatasi hak-hak etnis minoritas, dan menggunakan taktik bumi hangus terhadap beberapa organisasi etnis bersenjata.²⁵ Beberapa pertempuran terkini berpusat pada penguasaan sumber daya alam dan aktivitas ilegal, termasuk penambangan permata ilegal dan perdagangan narkoba.

Sebelum kudeta 2021 telah terjadi pertempuran di wilayah perbatasan Myanmar. Masyarakat etnik yang bersinggungan dengan pasukan pemerintah termasuk Tentara Pembebasan Nasional Karen di Negara Bagian Kayin; Tentara Kemerdekaan Kachin di Negara Bagian Kachin; dan Tentara Negara Bagian Shan di Negara Bagian Shan; di antara kelompok-kelompok lainnya. Puluhan ribu orang telah tewas dalam konflik tersebut. Selama bertahun-tahun pemantau hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran Tatmadaw terhadap warga sipil di wilayah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok etnis minoritas; ini termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, pemerkosaan, penyiksaan, dan penggunaan tentara anak-anak.

⁶³ MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

Ditengah terjadinya kudeta militer tengah banyak juga terjadi permasalahan antar kelompok etnis yang ada di Myanmar. Lebih dari satu juta orang melarikan diri ke luar negeri sebagai pengungsi sebelum kudeta 2021 dan ratusan ribu lainnya masih mengungsi di dalam negeri. Banyak dari pengungsi ini dalam beberapa tahun terakhir adalah Rohingya, etnis minoritas yang sebagian besar Muslim yang telah menghadapi penindasan selama puluhan tahun. Pada tahun 2016 hingga 2017 Tatmadaw dan pasukan keamanan setempat melancarkan operasi brutal terhadap Rohingya telah menewaskan ribuan orang dan menghancurkan ratusan desa. Kelompok hak asasi manusia dan pejabat PBB menduga bahwa militer melakukan genosida terhadap Rohingya.²⁶

Pada tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan internasional pertama terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional, menuduh negara tersebut melanggar Konvensi Genosida PBB. Baik pemerintah Suu Kyi maupun militer telah membantah bahwa pembersihan etnis sedang terjadi dan Suu Kyi membela militer di pengadilan di Den Haag. Perwakilan junta militer diperkirakan akan mengajukan keberatan awal terhadap kasus tersebut pada awal tahun 2022 dan putusan akhir dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Sebagian besar etnis Rohingya telah mencari perlindungan di Bangladesh, di mana sumber daya dan tanah untuk melindungi pengungsi terbatas. Bangladesh terus bersikeras agar pengungsi Rohingya dipulangkan ke Myanmar, tetapi kudeta tersebut menghentikan pembicaraan antara kedua negara. Kudeta tersebut

⁶⁴ MSF. (2021, December 30). *Responding to COVID-19 in Myanmar during political crisis*. MSF. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.msf.org/responding-Covid-19-myanmar-during-political-crisis>

mengakhiri proses perdamaian yang goyah yang dimulai oleh pemerintah Suu Kyi antara pemerintah pusat dan organisasi etnis bersenjata. Sebagian besar organisasi etnis bersenjata menentang junta militer, dan banyak yang bekerja sama dengan NUG. Yang lain mencoba mengkonsolidasikan kendali atas wilayah mereka, dengan pertempuran pecah di antara beberapa kelompok.

2.2.1 Demokrasi di Myanmar Pada Masa Pandemi Covid-19

Myanmar telah berjuang untuk menjadi sebuah negara yang demokratis sejak kemerdekaannya. Pandemi *Covid-19* telah menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi Myanmar dikarenakan semakin buruknya situasi politik yang terjadi akibat adanya kudeta militer pada tahun. Ancaman pada proses demokrasi yang sedang berlangsung nampak semakin nyata dikarenakan pengaruh oleh sistem kesehatan yang sudah rapuh. Pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2020 telah menunjukkan kemajuan dari demokrasi, tetapi kemenangan *National League of Democracy (NLD)* pada saat itu menimbulkan konflik antara militer dan pemerintah yang menang meningkat.²⁷ Rezim militer mengklaim bahwa kemenangan yang diperoleh dikarenakan adanya penipuan dalam proses pemungutan suara. Pengaruh militer yang semakin menguat di masa pandemi

⁶⁵ Kyi, K. (2020, May 26). *The Coronavirus Challenges Myanmar's Transition*. United States Institute of Peace. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-challenges-myanmars-transition>

Covid-19 menjadi dampak yang besar untuk transisi demokrasi yang diharapkan Myanmar.²⁸

Pemilihan umum yang dijadwalkan oleh Myanmar untuk dilaksanakan pada bulan November 2020 menjadi sebuah ujian berat untuk transisi demokrasi di Myanmar. Adanya pandemi telah mengalihkan perhatian pemerintah dan masyarakat sipil dari persiapan pemilihan menjadi berfokus pada isu kesehatan. Tak berhenti dalam hal tersebut, pendidikan pemilih juga terganggu dengan adanya pandemi *Covid-19* ini. Pembatasan terhadap mobilitas masyarakat juga menjadi dampak pada ketidakstabilan akibat pandemi.

Transisi demokrasi di Myanmar yang tergolong masih muda tengah bergantung pada pemilihan umum. Namun, pemerintah dan masyarakat sipil semakin terbebani dengan perjuangannya melawan pandemi *Covid-19*. Sementara itu, disisi lain tanda-tanda perkembangan militer menggunakan keadaan darurat *Covid-19* sebagai alat untuk memperkuat pengaruhnya dalam pemerintah dan masyarakat. Mempersiapkan pemilihan umum yang adil dan inklusif di tengah adanya krisis merupakan sebuah ujian terberat dalam transisi demokrasi yang sedang diperjuangkan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan tanpa *Covid-19*, tahun 2020 akan menjadi tantangan untuk upaya Myanmar dalam memajukan perdamaian dan demokrasi. Proses perdamaian untuk mengakhiri banyak konflik regional di negara itu telah gagal, sementara transisi dari militer ke pemerintahan yang sepenuhnya demokratis telah banyak mengalami

⁶⁶ Kyi, K. (2020, May 26). *The Coronavirus Challenges Myanmar's Transition*. United States Institute of Peace. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-challenges-myanmars-transition>

perkembangan yang lambat dan sulit dalam beberapa tahun terakhir. Namun, persaingan partisan dalam pemilihan umum nampak secara nyata mempersulit proses negosiasi perdamaian. Dengan hampir 100 partai politik yang terdaftar, banyak yang mewakili etnis minoritas dari daerah konflik, pemilihan umum ini sudah mulai terlihat sangat kompetitif.²⁹

Pada saat itu pandemi *Covid-19* memperburuk tantangan dalam mempersiapkan pemilihan umum. Krisis kesehatan masyarakat mengalihkan perhatian dan kapasitas pemerintahan nasional dan daerah yang dibutuhkan segera untuk mempersiapkan pemilihan umum. Organisasi masyarakat sipil Myanmar, yang memainkan peran penting dalam mendidik pemilih melalui lokakarya dan pertemuan publik, juga kewalahan oleh *Covid-19*. Kelompok masyarakat sipil telah turun tangan untuk menawarkan bantuan kepada penduduk, mendistribusikan bahan makanan pokok atau kebutuhan pokok lainnya bersama organisasi keagamaan dan perusahaan lokal. Bisku Buddha, gereja Kristen, dan pemimpin Muslim telah menawarkan kompleks mereka sebagai pusat karantina.³⁰

Seperti di banyak negara, *Covid-19* telah mempertajam ketegangan yang ada. Di Myanmar adanya pandemi *Covid-19* menjadi sebuah peluang besar untuk pemerintah junta militer untuk semakin menguasai Myanmar. Junta militer telah menggunakan kesempatan ini untuk menekan kebebasan berekspresi masyarakat Myanmar. Disamping itu ketidakterbukaan pada pelaporan data terkait jumlah

⁶⁷ Han, S. M. (2021). *Military Coup During Covid-19 Pandemic and Health Crisis in Myanmar*. <https://gh.bmj.com/content/6/4/e005801>.

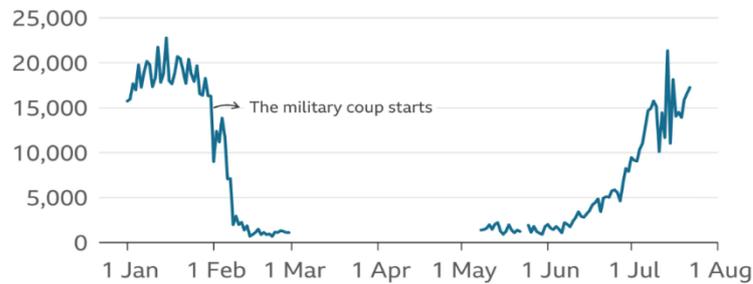
⁶⁸ Wicaksana, I. G. W. (2023, January 12). *ASEAN, COVID-19 and Myanmar crisis: Dealing with critical juncture*. NCBI. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9843146/>

kasus *Covid-19* di Myanmar pada tahun 2021. Jumlah kematian yang diakibatkan oleh pandemi ini juga tidak dimasukkan pada data resmi.³¹

Grafik 2.2 Ketidaktersediaan Data Maret – Mei 2021 Tentang Kasus *Covid-19*

Myanmar's daily Covid-19 testing in 2021

Specimens tested



Sumber : Our World in Data, Oxford University (as of July 22, 2021)

Pergeseran tersebut, ditambah dengan meningkatnya pertempuran antara tentara dan pemberontak etnis Rakhine di wilayah barat negara tersebut tentunya akan berdampak pada semakin berkuasanya junta militer.³² Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok etnis, aktivis, hingga kelompok-kelompok kepentingan yang ada sangatlah ditentang oleh Myanmar. Tak berhenti pada hal tersebut, junta militer melakukan penangkapan pada aktivis hingga jurnalis yang melakukan peliputan serta melakukan penahanan tanpa memperdulikan prosedur *Covid-19*.

Krisis dan pandemi *Covid-19* juga telah memberi militer Myanmar peluang baru untuk memperluas pengaruh politik yang telah dipertahankannya sejak berakhirnya pemerintahan militer formal pada tahun 2011. Di tengah upaya membangun demokrasi, angkatan bersenjata telah mempertahankan peran yang

⁶⁹ Tsoy, G. (2021, July 29). *Covid and a coup: The double crisis pushing Myanmar to the brink*. BBC. Retrieved October 28, 2024, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-57993930>

⁷⁰ Wittekind, C. T. (2021). *Crisis Upon Crisis: Fighting Covid-19 Becomes a Political Struggle after Myanmar's Military Coup*.

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-67-crisis-upon-crisis-fighting-Covid-19-becomes-a-political-struggle-after-myanmars-military-coup-by-courtney-t-wittekind/>.

kuat dalam pemerintahan, dalam hal dengan mensyaratkan pengaturan konstitusional yang menjamin mereka seperempat kursi di badan legislatif nasional. Militer menggunakan pengaruh dalam wacana publik, sebagian melalui surat kabar dan stasiun TV-nya pribadi dan melalui puluhan penangkapan dan tuntutan hukum terhadap organisasi berita. Disamping itu, junta militer melakukan pembatasan terhadap masyarakat untuk bermedia dengan melakukan pemberhentian terhadap akses internet.³³

Sebagai tanggapan terhadap pandemi negara membentuk Komite Pengendalian dan Tanggap Darurat *Covid-19* yang setengah dari anggotanya adalah pejabat yang ditunjuk militer, termasuk wakil presiden pertama yang sedang menjabat sebagai mantan letnan jenderal, U Myint Swe. Militer telah mencoba untuk memfokuskan perhatian publik pada layanan logistiknya dan menawarkan rumah sakit serta fasilitasnya untuk membantu menghadapi pandemi. Hal ini terkait dengan kinerjanya dibandingkan dengan tanggapan otoritas sipil terhadap *Covid-19*. Militer telah memanfaatkan respons *Covid-19* untuk mengurangi perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat di Negara Bagian Rakhine dan sebagai kedok atas upayanya untuk melemahkan pengaruh pemerintah sipil selama periode tanggap darurat.

Pertempuran yang meningkat antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata telah meningkatkan korban sipil dan mengusir ribuan orang lainnya di negara bagian Rakhine, Kachin, Kayin, dan Shan. Di Myanmar, hampir seperempat

⁷¹ Ebbighausen, R. (2021, February 8). *Myanmar coup protests inflamed by poverty and coronavirus* – DW – 02/08/2021. DW. Retrieved October 28, 2024, from <https://www.dw.com/en/myanmar-coup-protests-inflamed-by-poverty-and-coronavirus/a-56500168>

juta orang terlantar tinggal "pada kamp atau situasi seperti kamp" menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁴ Kekhawatiran khusus adalah meningkatnya pertempuran tahun ini di wilayah barat Myanmar yang mana sejak 2016 terdapat sebutan "operasi pembersihan" oleh junta militer yang telah mengusir lebih dari 700.000 etnis Rohingya yang beragama Islam. Para pengungsi tersebut berkumpul di Bangladesh yang berdekatan dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap virus *Covid-19* yang pada saat itu telah menyebar ke tempat yang merupakan pemukiman pengungsi terpadat di dunia.³⁵

Pertempuran terbaru di negara bagian Rakhine dan Chin terjadi antara militer Myanmar dan pemberontak Tentara Arakan yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis Rakhine yang beragama Buddha. Kekerasan termasuk serangan udara dan penembakan telah menewaskan banyak orang dan memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, militer mengecualikan pertempurannya dengan Tentara Arakan dari gencatan senjata nasional selama 16 minggu yang diumumkannya bulan ini untuk memfasilitasi penindasan pandemi *Covid-19*. Media berita Burma, dan penilaian independen berdasarkan konsultasi dengan pekerja kemanusiaan di Rakhine, mengatakan penyebaran pertempuran di barat berisiko menyebabkan sebagian besar wilayah dikecualikan dari pemungutan suara pada bulan November. Pihak berwenang telah

⁷² Maizland, L. (2022, January 31). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>

⁷³ Maizland, L. (2021). *Myanmar's Troubled History: COups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>

memutus akses ponsel ke internet untuk sekitar satu juta orang di daerah konflik, yang menghambat pekerjaan untuk menekan *Covid-19* dan mempersiapkan pemilu.

Pada bulan Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya tengah melancarkan kudeta. Langkah tersebut dilakukan setelah partai proksi militer, *The Union Solidarity Development Party (USDP)*, mengalami pukulan telak dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2020. Junta militer secara resmi disebut Dewan Administrasi Negara yang tengah menahan dan mendakwa pemimpin sipil de facto Aung San Suu Kyi atas tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya atas kemenangannya. Junta militer Myanmar menempatkan anggota parlemen dari partainya termasuk *National League of Democracy (NLD)*, dan partai-partai lainnya, serta banyak aktivis, dalam tahanan rumah.³⁶

Protes besar-besaran meletus di seluruh negeri dalam beberapa minggu setelah kudeta. Puluhan ribu orang, termasuk petugas kesehatan, bankir, dan guru, bergabung dengan apa yang awalnya merupakan gerakan pembangkangan sipil yang damai, menolak untuk pergi bekerja sampai pemerintah terpilih kembali berkuasa. Akhirnya, anggota parlemen *National League of Democracy (NLD)* yang digulingkan, pemimpin protes, dan aktivis dari beberapa kelompok minoritas membentuk pemerintahan paralel yang dikenal sebagai *National Unity Government of Myanmar (NUG)*. Bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok yang menentang junta, mendorong persatuan yang lebih besar di antara kelompok etnis,

⁷⁴ Maizland, L. (2022, January 31). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>

membuat agenda untuk Myanmar pasca-junta, dan menggalang dukungan dari pemerintah asing. Pada bulan September, *National Unity Government of Myanmar (NUG)* menyatakan perang terhadap junta dan membentuk divisi bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat.

Peta Myanmar yang menunjukkan lokasi kota-kota besar, divisi administratif, dan negara-negara terdekat, serta titik data yang relevan termasuk gambar daerah asal dari organisasi-organisasi etnis yang terbentuk.

Gambar 2 2 Peta Myanmar Termasuk Negara-negara Terdekat



sumber : *CIA World Factbook*

Tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat dan pelanggaran yang meluas dalam konflik tersebut telah menuai kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah asing, dan organisasi Hak Asasi Manusia. Pada awal terjadinya kudeta, pasukan militer menembakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa sipil dan ke

rumah-rumah penduduk. Pada akhir tahun 2021, militer menghancurkan seluruh desa yang diyakini mendukung oposisi, membantai warga sipil dan pejuang oposisi. Setidaknya 1.500 orang telah tewas oleh militer yang kemungkinan masih kurang dari jumlah sebenarnya menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Burma yang berbasis di Thailand.³⁷ Junta militer telah menangkap lebih dari delapan ribu orang, termasuk jurnalis, pekerja medis, dan politisi *National League of Democracy (NLD)*.

Hingga Januari 2022, analis melaporkan bahwa bentrokan antara Pasukan Pertahanan Rakyat dan militer terjadi di sebagian besar wilayah negara itu. "Kami melihat pertempuran sekarang di kota-kota yang belum pernah menyaksikan bentuk pertempuran apapun sejak kemerdekaan Myanmar," mengutip Jason Tower dari *United States Institute of Peace (USIP)*. Khususnya, kekerasan tidak terbatas pada wilayah di perbatasan Myanmar yang memiliki populasi etnis minoritas yang besar, tetapi juga terjadi di kota-kota besar di pusat kota seperti Mandalay dan Yangon. Kekerasan yang meluas telah menyebabkan ribuan warga sipil melarikan diri ke negara tetangga India dan Thailand.³⁸

Pihak oposisi telah mencegah militer mengkonsolidasikan kendali atas negara tersebut, sehingga Richard Horsey dari *International Crisis Group (ICG)* memperingatkan bahwa konfrontasi tersebut berlarut-larut dan semakin keras

⁷⁵ Maizland, L. (2022, January 31). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>

⁷⁶ Wittekind, C. T. (2021). *Crisis upon Crisis: Fighting Covid-19 Becomes a Political Struggle after Myanmar's Military Coup*. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-67-crisis-upon-crisis-fighting-Covid-19-becomes-a-political-struggle-after-myanmars-military-coup-by-courtney-t-wittekind/>

hingga tampak tak terelakkan. Namun, Jason Tower dari *United States Institute of Peace (USIP)* mengatakan bahwa mengingat kerugian besar Tatmadaw di medan perang, pasukan pertahanan rakyat dapat menguasai kendali militer hingga setengah dari kota-kota di Myanmar pada pertengahan tahun 2022.

2.3 Kelompok Kepentingan Pro-Demokrasi di Myanmar

Kelompok kepentingan pro demokrasi di Myanmar telah menjadi komponen penting dari perjuangan yang lebih luas melawan junta militer dan untuk pemerintahan yang demokratis. Kelompok kepentingan yang telah terbentuk dengan ciri khasnya masing-masing tengah bekerja sama untuk mempromosikan hak-hak manusia, demokrasi dan memperjuangkan kelompok etnis yang ada di Myanmar.

Berbagai macam kelompok kepentingan yang berjuang untuk demokrasi yang ada di Myanmar. Namun, perempuan Myanmar telah menjadi garda terdepan dalam upaya memperjuangkan hal ini. Mereka telah melakukan perjuangan melalui keamanan dan perlindungan bagi komunitas mereka, bekerja sama dengan aktor bersenjata, badan politik, dan kelompok hak asasi manusia untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan.³⁹

Advokasi untuk kesetaraan gender melalui sebuah kelompok kepentingan perempuan pro demokrasi telah ditekankan untuk perlunya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun

⁷⁷ Byrd, M. W. (2021, August 26). *Women on the Front Lines in Myanmar's Fight for Democracy*. Air University. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2747495/>

menghadapi banyak kendala, perempuan terus mengadvokasi perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di komunitas mereka. Gerakan ini berupaya untuk membongkar sikap patriarki yang secara historis telah meminggirkan perempuan dan kelompok etnis minoritas.

Menghadapi hal tersebut banyak tantangan dan peluang yang muncul yaitu masalah keamanan yang kerap dihadapi perempuan di Myanmar dimana menghadapi risiko keamanan yang signifikan, terutama di daerah yang rawan perang. Kurangnya keamanan fisik menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi. Pemberian dukungan dari internasional juga diharapkan guna membantu perjuangan di Myanmar.

Masyarakat internasional telah didesak untuk mengakui keberanian dan ketahanan perempuan Myanmar dan memberikan dukungan substantif untuk upaya mereka. Tanpa bantuan internasional, mencapai perubahan yang berarti melawan rezim militer yang bersenjata lengkap akan menjadi tantangan. Gerakan perempuan pro demokrasi di Myanmar merupakan bukti semangat aktivisme dan advokasi yang abadi bagi pemerintahan yang demokratis dan kesetaraan gender dalam menghadapi kesulitan.⁴⁰ Organisasi, gerakan perempuan dan kelompok kepentingan di Myanmar berfokus pada advokasi hak-hak perempuan, termasuk dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.⁴¹

⁷⁸ UNHQ. (2024, March 18). *Women's Political Participation and Empowerment in Post-Coup Myanmar*. International IDEA. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.idea.int/events/womens-political-participation-and-empowerment-post-coup-myanmar>

⁷⁹ Tan, D. (2024, July 1). *Unseen and Unheard: Violation of Women's Rights in Myanmar* / ICJ. International Commission of Jurists. Retrieved September 24, 2024, from

Meskipun tantangan yang harus dihadapi oleh gerakan-gerakan perempuan yang ada di Myanmar termasuk pada kekerasan domestik dan kekerasan seksual oleh militer. Namun, perempuan Myanmar tetap gigih ditunjukkan pada persentase partisipasi perempuan dalam melakukan upaya pro-demokrasi menyumbang sekitar 60% yang terlibat dalam pejuang pada garis depan hingga upaya perlawanan non-kekerasan.⁴² Tetapi data lainnya yang berkebalikan yaitu kurangnya representasi perempuan meskipun telah terdapat perkembangan dalam politik yang ada nampak pada pemilihan umum yang digelar pada 2015 dengan representasi perempuan di parlemen hanya mencapai sekitar 10%.⁴³

Adapun beberapa kelompok kepentingan pro-demokrasi yang sudah berjalan di Myanmar yang terdiri atas berbagai organisasi dan kelompok yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi dan kemanusiaan di Myanmar. Terdapat beberapa kelompok yang paling signifikan. *National League for Democracy (NLD)* yang didirikan pada 27 September 1999 merupakan sebuah kelompok kepentingan yang juga termasuk partai politik paling populer di Myanmar. Tujuan utama *National League for Democracy* adalah untuk meningkatkan demokrasi dan hak-hak sipil di negara tersebut. Sebelum kudeta militer pada tahun 2021, Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin partai ini dan simbol perjuangan untuk demokrasi di Myanmar.

<https://www.icj.org/myanmar-women-deprived-of-liberty-subjected-to-egregious-human-rights-violations-including-torture-and-other-ill-treatment/>

⁸⁰ Worldwide, S. D. (2024, March 18). *Women's Political Participation and Empowerment in Post-Coup Myanmar*. International IDEA. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.idea.int/events/womens-political-participation-and-empowerment-post-coup-myanmar>

⁸¹ Hidayatulloh, M. A. (2023). *The Advocacy of Women's Representation in Parliament in Myanmar By Local Women's Movement*. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>

National League for Democracy (NLD) aktif dalam mengadvokasi pemilihan umum yang bebas, memperjuangkan hak-hak sipil, dan mempromosikan keadilan sosial. Selama periode pemerintahan mereka, National League for Democracy berusaha untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari kekuatan militer yang masih berpengaruh di negara itu. Sejak kudeta, banyak anggota National League for Democracy ditangkap atau diasingkan, dan partai ini terus berjuang untuk kembali ke jalur demokrasi.

Kedua merupakan *Women's League of Burma (WLB)* yang didirikan pada 9 Desember 1999 dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi di Myanmar. Kelompok kepentingan yang juga merupakan sebuah organisasi ini berfokus pada beberapa isu utama, termasuk penghapusan kekerasan berbasis gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, dan melakukan advokasi internasional untuk hak-hak perempuan. *Women's League of Burma (WLB)* bekerja untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pendekatan yang holistik, *Women's League of Burma (WLB)* berupaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam konteks sosial dan politik di Myanmar, serta membangun jaringan solidaritas di antara perempuan dari berbagai latar belakang.

Berikutnya merupakan *National Unity Government (NUG)* yang didirikan setelah kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 sebagai respons terhadap

pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Tujuan utama *National Unity Government (NUG)* adalah menggantikan pemerintahan militer dengan pemerintahan sipil yang demokratis.⁴⁴ Aktivitas *National Unity Government (NUG)* mencakup koordinasi upaya perlawanan terhadap pemerintahan militer, mempromosikan federalisme sebagai bagian dari solusi politik jangka panjang, dan memperjuangkan hak-hak sipil serta keadilan sosial. *National Unity Government (NUG)* juga berupaya membangun dukungan internasional untuk mengakhiri pemerintahan militer dan mendorong transisi ke demokrasi. Melalui berbagai inisiatif, *National Unity Government (NUG)* berusaha untuk melibatkan masyarakat dan berbagai kelompok etnis dalam proses pembentukan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.

Adapun kelompok-kelompok etnis bersenjata di Myanmar, seperti *Arakan Army*, *Karen National Union (KNU)*, dan *United Wa State Army (UWSA)* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan otonomi etnis dan menghadapi pemerintahan militer.⁴⁵ Aktivitas yang dilakukan kelompok-kelompok ini meliputi perlawanan bersenjata dan keterlibatan dalam konflik bersenjata melawan militer Myanmar untuk mempertahankan hak-hak dan wilayah etnis mereka; promosi federalisme dengan melakukan advokasi sistem pemerintahan federal yang lebih inklusif, di mana masing-masing kelompok etnis memiliki otonomi dan hak yang lebih besar;

⁸² Loikaw, M. (2023, December 2). *Myanmar pro-democracy fighters battle to take state capital*. France 24. Retrieved October 2, 2024, from <https://www.france24.com/en/live-news/20231202-myanmar-pro-democracy-fighters-battle-to-take-state-capital>

⁸³ Nachemson, A. (2024, July 15). *In Myanmar, Ethnic Armed Groups Are Joining Forces With Democracy Activists*. Foreign Policy. Retrieved October 2, 2024, from <https://foreignpolicy.com/2024/07/15/myanmar-junta-arakan-army-federalism-democracy-nug-ethnic-minorities/>

Berpartisipasi dalam proses perdamaian melalui usaha untuk terlibat dalam dialog dan negosiasi dengan pemerintah untuk mencapai solusi damai yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi etnis yang beragam.

Kelompok-kelompok telah memiliki peran penting dalam dinamika politik dan sosial Myanmar, terutama dalam konteks perlawanan terhadap otoritas militer dan pencarian untuk keadilan serta pengakuan hak-hak etnis. Beberapa hal yang dapat dipahami dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada merupakan etnis minoritas dan aktivis pro-demokrasi di Myanmar yang telah lama melihat militer sebagai kekuatan penindas. Sejak para jenderal mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan *National League of Democracy (NLD)* Aung San Suu Kyi, banyak orang di Myanmar telah menaruh harapan mereka pada organisasi etnis bersenjata seperti Tentara Arakan—yang telah lama berjuang untuk otonomi politik di daerah perbatasan—untuk membebaskan negara itu. Mereka juga berharap kelompok-kelompok ini dapat mengawali era baru demokrasi federal yang masih jauh dari jangkauan bahkan selama dekade reformasi dari tahun 2011 hingga 2021.

Myanmar secara tradisional memiliki pemerintahan militer pusat yang kuat, dengan mengorbankan hak-hak politik kelompok etnis minoritas, yang sebagian dijanjikan otonomi pada tahun 1947. Janji itu tidak terpenuhi, dan selama beberapa dekade kelompok etnis bersenjata telah berjuang untuk kemerdekaan, otonomi, dan federalisme. Tetapi tidak pernah ada visi bersama tentang bagaimana federalisme akan berfungsi di Myanmar. *National League of Democracy (NLD)*, pada bagiannya, memblokir perubahan kebijakan federal tertentu, termasuk menolak

amandemen konstitusi yang akan melimpahkan kekuasaan untuk memungkinkan negara bagian dan daerah memilih kepala menteri mereka sendiri. Saat ini, opini publik telah beralih jauh ke arah lain dengan banyak pejuang demokrasi yang menyamakan federalisme dengan otonomi absolut.

Beberapa angkatan bersenjata etnis di Myanmar tampak benar-benar berkomitmen pada tujuan demokrasi federal yang dicanangkan, khususnya mereka yang berada di tenggara negara Myanmar yang berada di perbatasan Thailand. Namun, hal itu hanya akan berhasil jika semua unit federal telah menyetujui prinsip-prinsip politik tertentu dan hal ini jauh dari kasus di Myanmar. Kelompok-kelompok dengan kecenderungan yang lebih otoriter, seperti *Arakan Army* atau sekutunya di perbatasan Cina telah memandang memandang federalisme hanya sebagai pengaturan di mana mereka memerintah secara otonom atas wilayah mereka sendiri sesuai keinginan mereka, termasuk dengan laras senjata.⁴⁶

Adanya kelompok-kelompok kepentingan yang berfokus pada perjuangan demokrasi di Myanmar yang memiliki ciri khas berbeda-beda dan dedikasi untuk mengakhiri pemerintahan otoriter yang menguasai Myanmar telah membuktikan bahwa banyaknya pergerakan yang dilakukan masyarakat melalui berbagai cara. perjuangan melalui dialog hingga menggunakan senjata dilakukan masyarakat Myanmar untuk mendapatkan negara yang demokratis.

⁸⁴ Nachemson, A. (2024, July 15). *In Myanmar, Ethnic Armed Groups Are Joining Forces With Democracy Activists*. Foreign Policy. Retrieved October 2, 2024, from <https://foreignpolicy.com/2024/07/15/myanmar-junta-arakan-army-federalism-democracy-nug-ethnic-minorities/>